



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDUL HADI, bertempat tinggal di RT/RW 020/000, Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email labilahcok00@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

RONI PURNIAWAN, bertempat tinggal di RT/RW 020/000, Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email ronipurniawan822@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

SAILI, bertempat tinggal di RT/RW 020/002, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email zerooomuis@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

RAMLAN, bertempat tinggal di RT/RW 020/002, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email ramelan982@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

RAMIN, bertempat tinggal di RT/RW 020/002, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email a04esamsung9523@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli



DIYAN, bertempat tinggal di RT/RW 020/002, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email diyanagp511@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

FATMAWATI, bertempat tinggal di RT/RW 020/002, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email fw4722964@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

MATJIAN TO, bertempat tinggal di RT/RW 020/002, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email matjianto81@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Lawan:

ABU BIN KASDI, dahulu/terakhir kali bertempat tinggal di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal/keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, beralamat kantor di Komplek Perkantoran Gagas, Jalan A. Syairani, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email pertanahan.tanahlaut@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Helmy Fauzie, S.Si.T. selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 997/600.13-63.01/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 27 Juni 2023 Register Nomor 106/Leg/SK/2023/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Gugatan tertanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Objek Perkara adalah sebidang tanah dengan luas 14.750 M2 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang beralamat di Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas utara: Tanah Negara;
- Batas timur: Imah;
- Batas selatan: Jalan H. M. Sarbini;
- Batas barat: Tanah Negara;

termasuk bangunan yang berada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama Abu Bin Kasdi;

2. Bahwa mulanya Tergugat merupakan pemilik atas Objek Perkara sejak tahun 1977 yang didapatkan oleh Tergugat karena Tergugat merupakan peserta program transmigrasi;

3. Bahwa Para Penggugat masing-masing membeli bagian dari Objek Perkara tersebut dari Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1995 Penggugat I membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi) dan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli



- b. Pada tahun 2001 Penggugat II membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 945 M2 (sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) dan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Pada tahun 1999 Penggugat III membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 1.080 M2 (seribu delapan puluh meter persegi) dan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. Pada tahun 2003 Penggugat IV membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 1.080 M2 (seribu delapan puluh meter persegi) dan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Pada tahun 2001 Penggugat V membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 930 M2 (sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - f. Pada tahun 2001 Penggugat VI membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 600 M2 (enam ratus meter persegi) dan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Pada tahun 2021 Penggugat VII membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 472 M2 (empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - h. Pada tahun 2005 Penggugat VIII membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 3.736 M2 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) dan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Bahwa setelah Para Penggugat menyerahkan uang pembelian Objek Perkara kepada Tergugat, Tergugat juga menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1331/Durian Bungbuk atas nama Abu Bin Kasdi tersebut kepada Para Penggugat;
5. Bahwa sampai saat ini Objek Perkara masih dikuasai dan dimanfaatkan dengan baik oleh Para Penggugat;
6. Namun sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, Para Penggugat sudah tidak dapat lagi menghubungi Tergugat dan saat Para Penggugat mendatangi alamat tempat tinggal terakhir Tergugat, Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal/keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa oleh karena Para Penggugat sudah tidak dapat lagi menghubungi maupun bertemu dengan Tergugat, maka sampai dengan hari ini Para Penggugat tidak dapat melaksanakan proses balik nama atas Objek Perkara menjadi atas nama Para Penggugat sehingga hal tersebut membawa kerugian bagi Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari *cq.* Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat atas Objek Perkara;
3. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat sebagai pemilik atas Objek Perkara;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Para Penggugat berhak dan berwenang untuk melakukan proses balik nama dan pemecahan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama Abu Bin Kasdi (Tergugat) menjadi atas nama Abdul Hadi (Penggugat 1), Roni Purniawan (Penggugat 2), Saili (Penggugat 3), Ramlan (Penggugat 4), Ramin (Penggugat 5), Diyan (Penggugat 6), Fatmawati (Penggugat 7), dan Matjiatno (Penggugat 8) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Turut Tergugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun terhadap Tergugat telah dilaksanakan panggilan secara sah dan patut melalui panggilan umum;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan melalui panggilan umum oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaan/tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 470/018/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Durian Bungkok atas nama H. Sunhaji, sehingga sesuai dengan Pasal 718 *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg)/Pasal 390 ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka terhadap Tergugat telah dilaksanakan panggilan secara sah dan patut melalui panggilan umum Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan juga ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Pelaihari serta berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan umum terhadap Tergugat juga telah dilaksanakan melalui Surat Kabar/Harian Mata Banua yang telah terbit pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Nomor 001767120104438/XVI, namun demikian Tergugat tetap tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sengketa dalam perkara ini termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, oleh karenanya dalam perkara ini tidak dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa kepada Turut Tergugat diminta persetujuan/kesediaannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan Jawaban yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 630109120610003 atas nama Abdul Hadi, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301092502880001 atas nama Roni Purniawan, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301091303700002 atas nama Salli, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301090709570003 atas nama Ramlan, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301091008750001 atas nama Ramin, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301090805860001 atas nama Diyan, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301095410990002 atas nama Fatmawati, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301092212790002 atas nama Matjiatno, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama pemegang hak Abu Bin Kasdi, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-9;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593/064/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593/065/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593/066/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593/067/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593/068/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593/069/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593/070/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593/071/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-17;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/018/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Durian Bungkok atas nama H. Sunhaji, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-18;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi H. Sunhaji, Saksi Karyanto, dan Saksi Eri Suryanto yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Tergugat merupakan pemilik atas Objek Perkara dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama pemegang hak Abu Bin Kasdi;
- Bahwa kemudian Para Penggugat masing-masing membeli bagian dari Objek Perkara tersebut dari Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 1995 Penggugat I membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi) dan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - b. Pada tahun 2001 Penggugat II membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 945 M2 (sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) dan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Pada tahun 1999 Penggugat III membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 1.080 M2 (seribu delapan puluh meter persegi) dan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. Pada tahun 2003 Penggugat IV membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 1.080 M2 (seribu delapan puluh meter persegi) dan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Pada tahun 2001 Penggugat V membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 930 M2 (sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - f. Pada tahun 2001 Penggugat VI membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 600 M2 (enam ratus meter persegi) dan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Pada tahun 2021 Penggugat VII membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 472 M2 (empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pada tahun 2005 Penggugat VIII membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 3.736 M2 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) dan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Tergugat juga telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama pemegang hak Abu Bin Kasdi kepada Para Penggugat dan sampai saat ini masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat;
 - Bahwa tidak pernah ada orang yang mengajukan klaim/protes/keberatan selama Objek Perkara dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal/keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sampai dengan saat ini, Para Penggugat sudah tidak dapat lagi menghubungi Tergugat;
 - Bahwa sampai dengan hari ini Para Penggugat tidak dapat melaksanakan proses balik nama dan pemecahan atas Objek Perkara menjadi atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama pemegang hak Abu Bin Kasdi, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti TT-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk mengetahui kepastian letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan Objek Perkara, pada tanggal 11 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan setempat atas Objek Perkara sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat melakukan proses balik nama dan pemecahan atas Objek Perkara berupa sebidang tanah dengan luas 14.750 M2 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas utara: Tanah Negara;
- Batas timur: Imah;
- Batas selatan: Jalan H. M. Sarbini;
- Batas barat: Tanah Negara,

termasuk bangunan yang berada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama Abu Bin Kasdi menjadi atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan terhadap Tergugat pemeriksaan dianggap berlaku baginya tanpa bantahan terhadap dalil Para Penggugat, yang berakibat, Tergugat dianggap mengakui dalil Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Objek Perkara berupa sebidang tanah dengan luas 14.750 M2 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas utara: Tanah Negara;
 - Batas timur: Imah;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas selatan: Jalan H. M. Sarbini;
- Batas barat: Tanah Negara,

termasuk bangunan yang berada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama Abu Bin Kasdi;

- Bahwa mulanya Tergugat merupakan pemilik atas Objek Perkara dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama pemegang hak Abu Bin Kasdi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat melakukan proses balik nama dan pemecahan atas Objek Perkara menjadi atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR yang menentukan, "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi H. Sunhaji, Saksi Karyanto, dan Saksi Eri Suryanto;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-18 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa masing-masing Saksi telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg/Pasal 1911 KUHPerdara, keterangan

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti TT-1 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk mengetahui kepastian letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan Objek Perkara, pada tanggal 11 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan setempat atas Objek Perkara sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama pemegang hak Abu Bin Kasdi, bukti P-10 berupa Surat Keterangan Nomor: 593/064/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, bukti P-11 berupa Surat Keterangan Nomor: 593/065/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, bukti P-12 berupa Surat Keterangan Nomor: 593/066/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, bukti P-13 berupa Surat Keterangan Nomor: 593/067/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, bukti P-14 berupa Surat Keterangan Nomor: 593/068/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathurrozi, bukti P-15 berupa Surat Keterangan Nomor: 593/069/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, bukti P-16 berupa Surat Keterangan Nomor: 593/070/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, bukti P-17 berupa Surat Keterangan Nomor: 593/071/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, bukti P-18 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/018/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Durian Bungkok atas nama H. Sunhaji, bukti TT-1 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama pemegang hak Abu Bin Kasdi, keterangan Saksi H. Sunhaji, Saksi Karyanto, dan Saksi Ghofur, serta hasil pemeriksaan setempat atas Objek Perkara sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Objek Perkara berupa sebidang tanah dengan luas 14.750 M2 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas utara: Tanah Negara;
- Batas timur: Imah;
- Batas selatan: Jalan H. M. Sarbini;
- Batas barat: Tanah Negara,

termasuk bangunan yang berada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama Abu Bin Kasdi;

- Bahwa mulanya Tergugat merupakan pemilik atas Objek Perkara dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama pemegang hak Abu Bin Kasdi;

- Bahwa kemudian Para Penggugat masing-masing membeli bagian dari Objek Perkara tersebut dari Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada tahun 1995 Penggugat I membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi) dan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - b. Pada tahun 2001 Penggugat II membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 945 M2 (sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) dan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Pada tahun 1999 Penggugat III membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 1.080 M2 (seribu delapan puluh meter persegi) dan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. Pada tahun 2003 Penggugat IV membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 1.080 M2 (seribu delapan puluh meter persegi) dan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Pada tahun 2001 Penggugat V membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 930 M2 (sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - f. Pada tahun 2001 Penggugat VI membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 600 M2 (enam ratus meter persegi) dan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Pada tahun 2021 Penggugat VII membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 472 M2 (empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - h. Pada tahun 2005 Penggugat VIII membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 3.736 M2 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) dan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Tergugat juga telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama pemegang hak Abu Bin Kasdi kepada Para Penggugat dan sampai saat ini masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat;
 - Bahwa tidak pernah ada orang yang mengajukan klaim/protes/keberatan selama Objek Perkara dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal/keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini, Para Penggugat sudah tidak dapat lagi menghubungi Tergugat;

- Bahwa sampai dengan hari ini Para Penggugat tidak dapat melaksanakan proses balik nama dan pemecahan atas Objek Perkara menjadi atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg yang menentukan bahwa: *"la wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya"*, maka digariskan ketentuan bahwa Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya berdasarkan kewajiban tersebut, Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap Petitum yang ada didalam Gugatan meskipun tanpa mengikuti urutannya, sedangkan untuk Petitum Pertama akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedua dan Petitum Ketiga Gugatan Para Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menganut sistem hukum adat dalam peralihan hak atas tanah, salah satunya jual beli tanah yakni suatu perbuatan hukum, yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya, pada waktu pembeli membayar harga tanah tersebut kepada penjual, maka sejak itu hak atas tanah telah beralih dari penjual kepada pembeli, dengan kata lain bahwa sejak saat itu hak milik atas tanah telah beralih kepada pembeli, sedangkan jual beli tanah menurut hukum barat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1457 yang menentukan bahwa, *"jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan"*, kemudian pada Pasal 1458 yang menentukan bahwa, *"jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar"*, yang mana terhadap ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara hukum, jual beli adalah suatu bentuk

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya membayar harga yang telah ditentukan; pada saat kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat, maka jual beli telah dianggap terjadi, walaupun tanah belum diserahkan ataupun harganya belum dibayar;

Menimbang, bahwa jual beli tanah dalam perspektif hukum adat sebagai suatu perbuatan hukum pemindahan hak harus memenuhi 3 (tiga) sifat yakni:

- Harus bersifat tunai, artinya harga yang disetujui bersama dibayar penuh saat dilakukan jual beli yang bersangkutan;
- Harus bersifat terang, artinya pemindahan hak tersebut dilakukan diketahui orang banyak atau masyarakat sekitar;
- Bersifat riil atau nyata, artinya pembayaran dilakukan dengan penyerahan terhadap obyek yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama pemegang hak Abu Bin Kasdi, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor: 593/014/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor: 593/015/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor: 593/016/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, bukti P-8 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/018/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Durian Bungkok atas nama H. Sunhaji, bukti TT-1 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama pemegang hak Abu Bin Kasdi, keterangan Saksi H. Sunhaji dan Saksi Ghofur, serta hasil pemeriksaan setempat atas Objek Perkara sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa:

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tahun 1995 Penggugat I membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi) dan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- b. Pada tahun 2001 Penggugat II membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 945 M2 (sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) dan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Pada tahun 1999 Penggugat III membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 1.080 M2 (seribu delapan puluh meter persegi) dan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Pada tahun 2003 Penggugat IV membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 1.080 M2 (seribu delapan puluh meter persegi) dan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada tahun 2001 Penggugat V membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 930 M2 (sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Pada tahun 2001 Penggugat VI membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 600 M2 (enam ratus meter persegi) dan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Pada tahun 2021 Penggugat VII membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 472 M2 (empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- h. Pada tahun 2005 Penggugat VIII membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 3.736 M2 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) dan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),

dengan demikian jual beli atas Objek Perkara telah bersifat tunai;

Menimbang, bahwa pemenuhan sifat riil atau nyata terhadap jual beli tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat juga telah terpenuhi karena Tergugat juga telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama pemegang hak Abu Bin Kasdi kepada Para Penggugat dan sampai saat ini masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat tanpa pernah ada orang yang mengajukan klaim/protes/keberatan selama Objek Perkara dikuasai oleh Para Penggugat;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pemenuhan sifat terang terhadap jual beli tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat juga telah terpenuhi karena senyatanya Saksi H. Sunhaji, Saksi Karyanto, dan Saksi Eri Suryanto juga telah mengetahui dan mampu menjelaskan adanya jual-beli atas Objek Perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kepemilikan Tergugat terhadap Objek Perkara adalah karena mulanya Tergugat merupakan pemilik atas Objek Perkara dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama pemegang hak Abu Bin Kasdi dengan demikian Tergugat juga adalah orang yang berhak untuk melakukan jual-beli atas Objek Perkara dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jual-beli atas Objek Perkara dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat dan sejak tahun 2020 Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal/keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sampai dengan saat ini, Para Penggugat sudah tidak dapat lagi menghubungi Tergugat, maka jual-beli atas Objek Perkara tidak dapat dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diamanatkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun demikian berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat tersebut dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/1976 tertanggal 4 April 1978 dengan kaidah hukum bahwa, "*untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah. Akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1046 K/Pdt/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 dengan kaidah hukum bahwa, "*bukti Penggugat yang berupa kuitansi pembayaran serta keterangan Saksi-Saksi terbukti telah terjadi jual beli obyek sengketa secara tunai dan terang serta obyek sengketa telah diserahkan kepada Penggugat sebagai pembeli, walaupun jual beli obyek sengketa tidak melalui PPAT akan tetapi dengan telah dibayarnya obyek sengketa oleh Pembeli, obyek sengketa telah diserahkan kepada pembeli, maka jual beli obyek sengketa sah ...*", maka jual beli atas Objek Perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, dan oleh karena jual-beli atas Objek Perkara juga adalah sah, maka menurut hukum hak atas Objek Perkara telah beralih dari

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat sedemikian membuat Penggugat merupakan pemilik hak atas Objek Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitum Kedua dan Petitum Ketiga Gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum Keempat Gugatan Para Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu:

1. adanya perbuatan melawan hukum;
2. adanya kerugian;
3. adanya kesalahan; dan
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia perbuatan melawan hukum adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaedah tata susila, atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (*Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok perkara *a quo*, maka untuk menentukan apakah tindakan Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan diri Penggugat, tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang utama dan harus dipertimbangkan adalah adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara Penggugat selaku pembeli, apakah telah melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*) dalam hubungannya dengan Tergugat selaku penjual atau pemilik asal tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan "*Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud Pasal 19*" dan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan "*untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*", maka pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dimana pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah mengetahui status hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas, dan batas-batasnya, siapa pemiliknya dan beban-beban apa yang melekat terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu sebidang tanah agar dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/018/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Durian Bungkok atas nama H. Sunhaji, serta

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi H. Sunhaji, Saksi Karyanto, dan Saksi Eri Suryanto sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa sejak tahun 2020 Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal/keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sampai dengan saat ini, Para Penggugat sudah tidak dapat lagi menghubungi Tergugat, oleh karenanya sampai dengan hari ini Para Penggugat tidak dapat melaksanakan proses balik nama dan pemecahan atas Objek Perkara menjadi atas nama Para Penggugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa, *"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, tidak dapat dilaksanakan oleh Para Penggugat, dengan demikian karena ketidakhadiran Tergugat untuk membuat akta jual-beli di depan PPAT tersebut menyebabkan hak daripada Para Penggugat selaku pembeli dirugikan oleh Tergugat, yang mana dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat mendaftarkan hak miliknya terhadap tanah yang bersangkutan demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tersebut dipandang sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan telah melanggar hak subjektif Para Penggugat sehingga membawa kerugian bagi Para Penggugat, dengan demikian Tergugat telah nyata melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petition Keempat Gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petition Kelima Gugatan Para Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli atas Objek Perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah, dan oleh karena jual-beli atas Objek Perkara juga adalah sah, maka menurut hukum hak atas Objek Perkara telah beralih dari Tergugat kepada Para Penggugat sedemikian membuat Para

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan pemilik hak atas Objek Perkara namun demikian oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal/keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka proses balik nama atas Objek Perkara dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 94 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan Putusan ini Para Penggugat sudah dapat mendaftarkan pemindahan serta peralihan hak atas Objek Perkara sekaligus melakukan proses balik nama dan kemudian pemecahan Sertipikat Hak Milik atas Objek Perkara menjadi atas nama Para Penggugat setelah selesainya proses balik nama Sertipikat Hak Milik atas Objek Perkara, karena Putusan Pengadilan sama kekuatannya dan dapat dijadikan sebagai pengganti Akta yang tidak dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan secara hukum kadar kebenarannya dianggap cukup untuk dijadikan landasan dalam mendaftarkan pemindahan serta peralihan hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-9 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama pemegang hak Abu Bin Kasdi, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor: 593/014/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor: 593/015/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor: 593/016/KM-TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Durian Bungkok atas nama Muhammad Fathurrozi, bukti P-8 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/018/KM-

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALA/DB/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Durian Bungkok atas nama H. Sunhaji, bukti TT-1 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama pemegang hak Abu Bin Kasdi, keterangan Saksi H. Sunhaji, Saksi Karyanto, dan Saksi Ghofur, serta hasil pemeriksaan setempat atas Objek Perkara sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa:

- a. Pada tahun 1995 Penggugat I membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi) dan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- b. Pada tahun 2001 Penggugat II membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 945 M2 (sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) dan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Pada tahun 1999 Penggugat III membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 1.080 M2 (seribu delapan puluh meter persegi) dan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Pada tahun 2003 Penggugat IV membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 1.080 M2 (seribu delapan puluh meter persegi) dan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada tahun 2001 Penggugat V membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 930 M2 (sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Pada tahun 2001 Penggugat VI membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 600 M2 (enam ratus meter persegi) dan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Pada tahun 2021 Penggugat VII membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 472 M2 (empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- h. Pada tahun 2005 Penggugat VIII membeli bagian dari Objek Perkara dengan luas 3.736 M2 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) dan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, atas permintaan Para Penggugat sebagai pemegang hak Objek Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dapat melakukan pemecahan secara sempurna terhadap Objek Perkara menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula, yang dilaksanakan setelah selesainya proses balik nama Sertipikat Hak Milik atas Objek Perkara menjadi atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitem Kelima Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian pelaksanaan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut tidak mengesampingkan kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mengenai isi Putusan ini bila nantinya Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap *linkracht van gewijsde*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan demikian Petitem Kesatu Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg/Pasal 181 ayat (1) HIR yang pada pokoknya menentukan bahwa, "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 48 ayat (1) Peraturan

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 94 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah dengan luas 14.750 M2 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas utara: Tanah Negara;
 - Batas timur: Imah;
 - Batas selatan: Jalan H. M. Sarbini;
 - Batas barat: Tanah Negara,termasuk bangunan yang berada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama Abu Bin Kasdi;
3. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat merupakan pemilik atas sebidang tanah dengan luas 14.750 M2 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas utara: Tanah Negara;
- Batas timur: Imah;
- Batas selatan: Jalan H. M. Sarbini;
- Batas barat: Tanah Negara,

termasuk bangunan yang berada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama Abu Bin Kasdi;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan Para Penggugat berhak dan berwenang untuk melakukan proses balik nama ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama Abu Bin Kasdi menjadi atas nama Para Penggugat, yaitu Abdul Hadi, Roni Purniawan, Salli, Ramlan, Ramin, Diyan, Fatmawati, dan Matjiatno, dan kemudian atas permintaan Para Penggugat tersebut dapat dilakukan pemecahan secara sempurna terhadap sebidang tanah dengan luas 14.750 M2 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas utara: Tanah Negara;
- Batas timur: Imah;
- Batas selatan: Jalan H. M. Sarbini;
- Batas barat: Tanah Negara,

termasuk bangunan yang berada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama Abu Bin Kasdi setelah selesainya proses balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1331/Durian Bungkok atas nama Abu Bin Kasdi menjadi atas nama Para Penggugat tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho,

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.....A	:	Rp50.000,00
TK	:	
3.....P	:	Rp1.500.000,00
anggilan	:	
4.....P	:	Rp110.000,00
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp1.700.000,00
emeriksaan Setempat	:	
6.....P	:	Rp10.000,00
NBP Pemeriksaan Setempat	:	
7.....R	:	Rp10.000,00
edaksi	:	
8.....M	:	Rp10.000,00
eterai	:	
	:	Rp3.420.000,00
Jumlah	:	(tiga juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pli